

**PARTISIPASI POLITIK ETNIS JAWA PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH 9  
DESEMBER 2015 DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN****Valentina Hutabarat dan Agus Anjar**

1. Mahasiswa STKIP Labuhanbatu
2. Dosen STKIP Labuhanbatu

**Program Studi PPKn  
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Labuhanbatu**

---

**Abstrak**

Penelitian ini menerangkan pada Pilkada 9 Desember 2015 partisipasi Politik Etnis Jawa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tinggi dikarenakan adanya kesadaran dari masyarakat untuk menyuarakan hak pilihnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif Kualitatif. Adapun yang memberikan informasi atau keterangan (informan) adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Ketua partai golongan Karya (GOLKAR), Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Ketua Partai Amanat Nasional (PAN), Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ketua Organisasi Masyarakat Jawa Sekar Mirah. Teknik Pengumpulan Data dengan tehnik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat beberapa hal yang harus diketahui yaitu partisipasi politik etnis jawa pada Pilkada 9 Desember 2015 di Kabupaten Labuhanbatu Selatan termasuk kategori tinggi. Dibuktikan dari hasil wawancara kepada ketujuh informan di atas. Tingginya angka partisipasi masyarakat etnis jawa tidak terlepas dari penyelenggaraan yang mensosialisasikan tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah 9 Desember 2015 di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

**Kata Kunci : Partisipasi Politik Etnis Jawa, Pemilihan Umum Kepala Daerah**

**Kajian:  
Pembelajaran PPKn****Pengertian Partisipasi Politik**

Partisipasi politik secara umum adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai, atau kelompok kepentingan.

Partisipasi politik ialah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan ikut menentukan pemimpin pemerintahan. Kegiatan yang dimaksud antara lain, mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik dan koreksi atas pelaksanaan suatu kebijakan umum, dan mendukung atau menentang calon pemimpin, mengajukan alternatif pemimpin, dan memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum. Dalam hal ini partai politik mempunyai fungsi untuk membuka kesempatan, mendorong dan mengajak para

anggota dan anggota masyarakat yang lain untuk menggunakan partai politik sebagai saluran kegiatan mempengaruhi proses politik. Jadi, partai politik merupakan wadah partisipasi politik. Fungsi ini lebih tinggi posisinya dalam sistem politik demokrasi daripada dalam sistem politik totaliter karena dalam sistem politik yang terakhir ini lebih mengharapkan ketaatan dari para warga daripada aktivitas mandiri.

Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson (Budiardjo, 1982), berpendapat partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.

Menurut Herbert MacClosky (Budiardjo, 1982), berpendapat Partisipasi Politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga, masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara

**Kajian:  
Pembelajaran PPKn**

langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Menurut Norman H. Nie dan Sidney Verba (Budiardjo, 1982), berpendapat partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka. Yang diteropong terutama adalah “tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah”, sekalipun fokus sebenarnya lebih luas tetapi abstrak, yaitu usaha-usaha untuk mempengaruhi “alokasi nilai secara otoritatif untuk masyarakat”.

## 1.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

**Partisipasi politik, sebagai suatu aktivitas, tentu banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor.** Banyak pendapat yang menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik. Ada yang menyoroti faktor-faktor dari dalam diri seseorang, ada yang menyoroti faktor-faktor dari luar dan ada yang menggabungkannya.

Weimar (Sastroadmodjo, 1995) menyebutkan paling tidak ada 5 faktor yang mempengaruhi partisipasi politik antara lain:

1. Modernisasi di segala bidang berimplikasi pada komersialisasi pertanian, industrialisasi, meningkatnya arus urbanisasi, peningkatan tingkat pendidikan, meluasnya peran media massa dan media komunikasi. Kemajuan itu berakibat pada meningkatnya partisipasi warga negara, terutama di perkotaan, untuk turut serta dalam kekuasaan politik. Mereka ini misalnya kaum buruh, para pedagang dan para profesional.

2. Terjadinya perubahan-perubahan struktur kelas esensial. Dalam hal ini adalah munculnya kelas menengah dan pekerja baru yang semakin meluas dalam era industrialisasi. Kemunculan mereka tentu saja dibarengi tuntutan-tuntutan baru pada gilirannya akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah.

3. Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa. Ide-ide nasionalisme, liberalisme, dan egaliterisme membangkitkan tuntutan-tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan

**Kajian:  
Pembelajaran PPKn**

keputusan. Komunikasi yang meluas mempermudah.

4. Adanya konflik diantara pemimpin-pemimpin politik. Pemimpin politik yang saling memperebutkan kekuasaan, seringkali untuk mencapai kemenangan dilakukan dengan cara mencari dukungan massa. Dalam konteks ini seringkali terjadi partisipasi yang dimobilisasikan.

5. Adanya keterlibatan pemerintah yang semakin meluas dalam urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah ini seringkali merangsang tumbuhnya tuntutan yang terorganisasi untuk ikut serta dalam mempengaruhi perbuatan keputusan politik. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari perbuatan pemerintah dalam segala bidang kehidupan.

### 2.3 Etnis Jawa

Suku Jawa merupakan suku terbesar di Indonesia yang berasal dari Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Setidaknya 41,7% penduduk Indonesia merupakan etnis jawa sebelumnya suku jawa berjumlah 47,05% pada tahun 1930 yang di adakan oleh Pemerintahan Kolonial Belanda

pada waktu itu, penurunan ini terjadi karena banyaknya orang jawa yang menjadi bagian dari etnis setempat di beberapa daerah di Indonesia. Selain di ketiga provinsi tersebut, suku jawa banyak bermukim di Lampung, Jakarta, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Banten dan Kalimantan Timur. Di Jawa Barat mereka banyak ditemukan di kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, dan kota Cirebon.

Budaya Jawa adalah budaya yang berasal dari Jawa dan dianut oleh masyarakat Jawa khususnya di Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur Budaya Jawa secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 yaitu budaya Banyumasan, budaya Jawa Tengah-DIY dan budaya Jawa Timur. Budaya Jawa mengutamakan keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan sehari hari. Budaya Jawa menjunjung tinggi kesopanan dan kesederhanaan. Dari segi kepercayaan mayoritas orang Jawa menganut agama Islam (sekitar 95%).

Dari segi seni orang Jawa terkenal dengan budaya seninya yang terutama dipengaruhi oleh agama Hindu-Buddha, yaitu pementasan wayang. Repertoar cerita

**Kajian:**  
**Pembelajaran PPKn**

wayang atau lakon sebagian besar berdasarkan wiracarita Ramayana dan Mahabharata. Selain pengaruh India, pengaruh Islam dan Dunia Barat ada pula Seni batik dan keris merupakan dua bentuk ekspresi masyarakat Jawa. Musik gamelan, yang juga dijumpai di Bali memegang peranan penting dalam kehidupan budaya dan tradisi Jawa.

Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan terdapat masyarakat Etnis Jawa yang datang, baik yang statusnya pendatang maupun statusnya menetap. Untuk masyarakat Etnis Jawa yang pendatang merupakan masyarakat yang berasal dari Pulau Jawa dan berpindah tempat ke Kabupaten Labuhanbatu Selatan hanya melakukan pekerjaan. Sedangkan masyarakat Etnis Jawa yang dikatakan menetap adalah masyarakat yang berasal dari Pulau Jawa dan telah tinggal lama di Kabupaten Labuhanbatu Selatan serta disahkan sebagai warga tetap Labuhanbatu Selatan. Dari hasil observasi yang dilakukan di Badan Pusat Statistik (BPS) oleh peneliti, terdapat 155.587 Etnis Jawa dengan persentase secara keseluruhan sebesar 49.80% yang tinggal di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Di Kabupaten

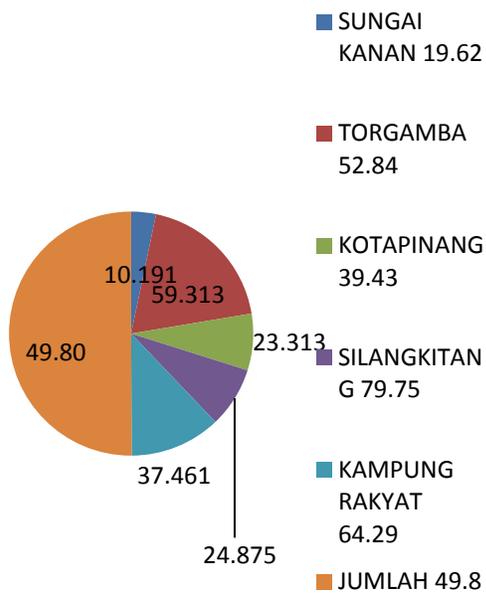
Labuhanbatu Selatan terdapat 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Sungai Kanan dengan jumlah 10.191 Etnis Jawa, Kecamatan Torgamba terdapat 59.313 Etnis Jawa, Kecamatan Kotapinang dengan jumlah 23.747 Etnis Jawa, Kecamatan Silangkitang terdapat 24.875 Etnis Jawa dan Kampung Rakyat 37.461 Etnis Jawa.

**Tabel jumlah Etnis Jawa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan**

KECAMATAN	JUMLAH SUKU JAWA	PERSENTASI
SUNGAI KANAN	10.191 orang	19.62
TORGAMBA	59.313 orang	52.84
KOTAPINANG	23.747 orang	39.43
SILANGKITANG	24.875 orang	79.75
KAMPUNG RAKYAT	37.461 orang	64.29
<b>JUMLAH</b>	<b>155.587 orang</b>	<b>49.80</b>

## Kajian: Pembelajaran PPKn

### JUMLAH SUKU JAWA



#### 2.4 Studi Perilaku Pemilih

Adapun studi perilaku pemilih disebabkan beberapa faktor di antaranya yaitu :

##### a. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan ini pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku memilih seseorang. Karakteristik sosial (seperti pekerjaan, pendidikan dan sebagainya) dan karakteristik atau latar belakang sosiologis (seperti agama, wilayah, jenis kelamin, umur dan sebagainya) merupakan faktor penting dalam menentukan pilihan politik. Pendek kata, pengelompokan sosial seperti umur (tua-muda), jenis kelamin (laki-perempuan), agama dan sebagainya dianggap

mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam membentuk pengelompokan sosial baik secara formal seperti keanggotaan seseorang dalam organisasi-organisasi keagamaan, organisasi-organisasi profesi dan sebagainya maupun pengelompokan informal seperti keluarga, pertemanan ataupun kelompok-kelompok kecil lainnya, merupakan sesuatu yang sangat vital dalam memahami perilaku politik seseorang, karena kelompok-kelompok inilah yang mempunyai peranan besar dalam membentuk sikap, persepsi dan orientasi seseorang.

##### b. Pendekatan Psikologis

Pendekatan ini menjelaskan bahwa sikap seseorang sebagai refleksi dari kepribadian seseorang yang cukup menentukan dalam mempengaruhi perilaku politik seseorang. Oleh karena itu, pendekatan psikologis menekankan pada tiga aspek psikologis sebagai kajian utama, yaitu ikatan emosional pada suatu partai politik, orientasi terhadap isu-isu dan orientasi terhadap kandidat. Melalui proses sosialisasi inilah kemudian berkembang ikatan psikologis yang kuat antara seseorang dengan organisasi kemasyarakatan atau partai politik, yang berupa simpati terhadap partai politik. Ikatan psikologis inilah yang kemudian dikenal sebagai identifikasi partai.

##### c. Pendekatan Rasional

Pendekatan ini menjelaskan bahwa para pemilih dapat menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional. Perilaku memilih berdasarkan pertimbangan rasional tidak hanya berupa memilih alternatif yang paling menguntungkan atau mendatangkan kerugian yang paling sedikit. Tetapi juga dalam memilih alternatif yang menimbulkan

## **Kajian: Pembelajaran PPKn**

resiko yang paling kecil, yang penting mendahulukan selamat. Dengan begitu, diasumsikan para pemilih mempunyai kemampuan untuk menilai isu-isu politik yang diajukan. Begitu juga mampu menilai calon atau kandidat yang ditampilkan. Penilaian rasional terhadap isu politik atau kandidat ini bisa didasarkan pada jabatan, informasi, pribadi yang populer karena prestasi di bidang masing-masing seperti seni, olahraga, organisasi, politik, dan sebagainya.

### **2.5 Pengertian Pemilihan Umum**

Pemilihan Umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak.

Walaupun setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk memilih, namun undang-undang Pemilu mengadakan pembatasan umur untuk dapat ikut serta di dalam pemilihan umum. Batas waktu untuk menetapkan batas umum ialah waktu pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum, yaitu sudah genap berumur 17 tahun atau sudah kawin.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **Jenis Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif Metode Deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk mengungkapkan kejadian

atau fakta, keadaan, fenomena, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi.

### **3.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

#### **a. Tempat Penelitian**

Adapun yang menjadi tempat pelaksanaan penelitian ini adalah wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

#### **b. Waktu penelitian**

Waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan bulan Juni tahun 2017.

### **3.3 Informan**

Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Ormas Jawa, Partai Politik, Masyarakat Jawa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam hal ini, teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah melalui Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

#### **a. Observasi**

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Jenis observasi meliputi :

- Observasi langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.

#### **b. Wawancara**

Wawancara ialah Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Tujuan wawancara yaitu

## Kajian: Pembelajaran PPKn

untuk mendapatkan data ditangan pertama serta menguji hasil pengumpulan data lainnya.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi yang nantinya akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah segala bentuk dokumentasi atau dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah cara untuk mengolah data menjadi informasi agar karakteristik data tersebut mudah dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama hal yang berkaitan dengan penelitian. Analisis data bisa juga diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk merubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya dapat dipergunakan untuk mengambil kesimpulan.

Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2016:88) menyatakan teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dipahami, dan temuannya dapat di informasikan.

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik Interpretasi Data. Interpretasi data adalah kegiatan menggabungkan hasil analisis dengan pernyataan, kriteria, atau standar tertentu untuk menentukan makna dari data yang dikumpulkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

### Analisis dan Pembahasan Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Dari data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai berikut :

**Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan**

N O	Kecamatan	2016	LK	PR
1	Sungai kanan	53.143	26.886	26.257
2	Torgamba	114.638	58.840	55.798
3	Kotapinang	61.322	31.173	30.149
4	Silangkitang	31.683	16.050	15.633
5	Kampung Rakyat	59.595	30.441	29.154
6	Labuhanbatu Selatan	320.381	163.390	156.991

**Tabel 4.5 Daftar Calon Etnis Jawayang Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan**

No	Nama	Jabatan	Fraksi
1	Satiman	Bendahara Fraksi	PDI Perjuangan
2	H. Lahmuddin	Ketua Fraksi	PKS
3	Ir. Hari Maryono	Aggota Fraksi	GERINDRA
4	H. Sutiman	Ketua Fraksi	GOLKAR
5	Muhammad Aris, S.Ag	Wakil Sekretaris Fraksi	GOLKAR

### Analisis Terhadap Hasil Wawancara Dengan Partai Politik Golongan Karya

Adapun proses wawancara yang peneliti lakukan terhadap 5 Partai Politik di Labuhanbatu Selatan di peroleh informasi yang berbeda.

Pertama dari Partai Politik Golongan Karya (GOLKAR), peneliti dapat menganalisis

**Kajian:  
Pembelajaran PPKn**

bahwa faktor yang mempengaruhi perilaku memilih Etnis Jawa tergantung di calonnya, tidak ada yang menonjol di Pilkada, politisasi calon itulah yang dilihat sejauh mana sudah melakukan indeks pendekatan dengan masyarakat.

Demikian peneliti juga mempunyai pendapat yang sama terhadap informan bahwa masyarakat juga menilai sejauh mana tiap pasangan calon sudah melakukan pendekatan kepada masyarakat, dan berbuat terhadap masyarakat, jangan saat iven Pilkada saja si calon tersebut melakukan pendekatan.

#### **4.2.2 Analisis Terhadap Hasil Wawancara Dengan Partai Politik PDI Perjuangan**

Dari Partai Politik PDI Perjuangan, peneliti dapat menganalisis bahwa faktor yang mempengaruhi perilaku memilih Etnis Jawa adalah yang mendominasi yaitu dengan adanya uang, namun itu tidak serta merta banyak faktor lain seperti adanya faktor keluarga, kerabat dan lain sebagainya.

Demikian peneliti juga mempunyai pendapat yang sama terhadap informan bahwa memang faktor yang mendominasi yaitu uang, namun itu tidak menyeluruh, masih banyak masyarakat yang berfikir secara rasional artinya masih banyak masyarakat berfikir bahwa hak suara mereka itu sangat berharga dengan itu masih ada beberapa masyarakat yang memilih berdasarkan visi misi dan lain sebagainya.

#### **4.2.3 Analisis Terhadap Hasil Wawancara Dengan Penyelenggara Pemilu (KPU) Kabupaten Labuhanbatu Selatan**

Dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), peneliti dapat menganalisis bahwa faktor yang mempengaruhi perilaku memilih Etnis Jawa karena masyarakat Jawa sudah membaaur dengan komunitas atau suku lain. Namun pada dasarnya karena memang sudah saling memahami tentang pentingnya demokrasi artinya Etnis suku Jawa memahami pentingnya setiap pergantian yang secara legal dan sah yang dilakukan oleh Pemilu.

Demikian peneliti juga mempunyai pendapat yang sama terhadap informan bahwa karena masyarakat sudah berbaaur dengan suku lain sehingga sudah memahami pentingnya berdemokrasi.

#### **4.2.4 Analisis Terhadap Hasil Wawancara Dengan Partai Amanat Nasional (PAN)**

Dari Partai Amanat Nasional (PAN), peneliti dapat menganalisis bahwa faktor yang mempengaruhi perilaku memilih Etnis Jawa karena dorongan yang mengusung calon Bupati dan Wakil Bupati adalah Partai Politik, dan adanya kebiasaan masyarakat itu sendiri.

Demikian peneliti juga mempunyai pendapat yang sama terhadap informan bahwa Partai Politik juga berperan penting dalam pelaksanaan Pilkada itu sendiri.

#### **4.2.5 Analisis Terhadap Hasil Wawancara Dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)**

Dari Partai Amanat Keadilan Sejahtera (PKS), peneliti dapat menganalisis bahwa faktor yang mempengaruhi perilaku memilih Etnis Jawa ialah karena adanya

**Kajian:  
Pembelajaran PPKn**

faktor sosialisasi dari calon dan tim suksesnya.

Demikian peneliti juga mempunyai pendapat yang sama terhadap informan bahwa faktor sosialisasi dari tiap calon dan tim suksesnya sangat diperlukan, agar masyarakat lebih memahami bagaimana proses pelaksanaan Pilkada yang baik yang sesungguhnya.

#### **4.2.6 Analisis Terhadap Hasil Wawancara Dengan Organisasi Masyarakat Jawa Sekar Mirah**

Dari Organisasi Masyarakat Sekar Mirah, peneliti dapat menganalisis bahwa faktor yang mempengaruhi perilaku memilih Etnis Jawa ialah pemimpin yang bertanggung jawab yang dapat membawa perubahan bagi Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Demikian peneliti juga mempunyai pendapat yang sama terhadap informan bahwa siapapun Pemimpin nya intinya dapat bertanggung jawab dan membawa perubahan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan berdampak bagi masyarakat banyak.

Dari Partai Gerindra, peneliti dapat menganalisis bahwa faktor yang mempengaruhi perilaku memilih Etnis Jawa ialah yaitu adanya faktor kedaeraan, satu kampung dimana rasa kecintaan satu daerah sehingga itu juga salah satu faktor yang mempengaruhi.

Demikian peneliti juga mempunyai pendapat yang sama terhadap informan bahwa faktor kedaeraan juga sangat mempengaruhi hak pilih masyarakat dalam menentukan hak pilihnya

#### **4.2.7 Analisis Terhadap Hasil Wawancara Dengan Partai Gerindra**

Dari Partai Gerindra, peneliti dapat menganalisis bahwa faktor yang mempengaruhi perilaku memilih Etnis Jawa ialah yaitu adanya faktor kedaeraan, satu kampung dimana rasa kecintaan satu daerah sehingga itu juga salah satu faktor yang mempengaruhi.

Demikian peneliti juga mempunyai pendapat yang sama terhadap informan bahwa faktor kedaeraan juga sangat mempengaruhi hak pilih masyarakat dalam menentukan hak pilihnya.

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Peran masyarakat Etnis Jawa pada pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah 9 Desember 2015 di Kabupaten Labuhanbatu Selatan sangat tinggi dikarenakan kesadaran berdemokrasi dari masyarakat itu sendiri.
- b. Faktor penyebab Etnis Jawa memberikan hak pilihnya pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 9 Desember 2015 di Kabupaten Labuhanbatu Selatan disebabkan :
  - Masyarakat merasa memiliki hak pilih dan hak suara sehingga masyarakat mau datang ke TPS
  - adanya pengaruh dari tiap calon Kepala Daerah kepada masyarakat

**Kajian:**  
**Pembelajaran PPKn**

- adanya kesadaran berdemokrasi dari masyarakat itu sendiri

**2. Saran**

- a. Saran yang diberikan pertama diberikan kepada Partai politik harus lebih kerja keras lagi dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya kepada pemilih pemula bagaimana cara memilih yang baik, karena pemilih pemula cenderung lebih energik dan antusias dalam iven-iven Pilkada, maka dari itu partai politik harus lebih ekstra memberikan suatu pemahaman kepada pemilih pemula khususnya. Partai politik sebagai wadah aspirasi masyarakat artinya dengan adanya partai politik yaitu membantu jalannya proses Pilkada agar berjalan dengan baik, dan mewujudkan pemimpin yang baik dan professional dalam mengolah suatu daerah nya.
- b. Saran untuk penyelenggara Pilkada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah perlu ditingkatkannya sosialisasi kepada masyarakat mengenai Pemilihan Kepala Daerah, bagaimana cara memilih yang baik agar pola pikir masyarakat itu berubah mengenai pemahaman politik itu sendiri.
- c. Saran untuk Pengawas Pemilihan Umum pada Pilkada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu lebih ditingkatkannya lagi pengawasan terhadap proses berjalannya Pilkada.
- d. Saran untuk Tokoh Masyarakat Jawa yaitu dengan memberikan motivasi dan masukan kepada masyarakat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah itu sendiri sehingga masyarakat meniriru

hal yang baik dan positif dari tokoh masyarakat tersebut.

- e. Saran untuk masyarakat yaitu adanya keterbebanan dalam menyuarakan hak suaranya pada Pilkada 9 Desember 2015 di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu.
- Herbert MacClosky (Budiardjo, 1982) *Partisipasi Dan Partai Politik*. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Muhammad Asfar. 2006. *Pemilu Dan Perilaku Memilih*. Surabaya: Penerbit Eureka.
- Norman H. Nie dan Sidney Verba (Budiardjo, 1982) *Partisipasi Dan Partai Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Sugiyono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Surbakti Ramlan. 2007. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Samuel P. Hantington dan Joan M. Nelson (Budiardjo, 1982) *Partisipasi Dan Partai Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Undang-undang Republik Indonesia No 34 Tahun 2004 *Tentang Pilkada*. 2015. Citra Umbara.
- Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Weiner (Sastroadmodjo, 1995) *Sosiologi Dan Politik*. Indonesia: Ghalia.